Efektivitas E-Procurement Dalam Penerapan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintah Kota Surabaya

Widya Dharmawan a,1,\*, Agus Widiyarta b,2

Efektivitas e-procurement dalam penerapan pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota surabaya

Widya Dharmawan a,1,\*, Agus Widiyarta b,2

a Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Kota Surabaya, Indonesia

1 Widyadharmawan13@gmail.com1;Aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id2

\* Corresponding author: Widyadharmawan13@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARTICLE INFO / INFO ARTIKEL | | |
| **Kata Kunci**  E-Procurement  E-government  Efektivitas |  | ABSTRACT  Bentuk e-government Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menerapkan e-procurement dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa (lelang). E-procurement merupakan inovasi dari pengadaan secara konvensional ke pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Pemerintah Surabaya memaknai Peran dari teknologi digital akan menjadi sangat penting dalam pelayanan publik di masa depan dengan mendorong percepatan layanan dan mengurangi anggaran dengan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah e-procurement sudah efektif dalam penerapannya pada pemerintahan kota Surabaya. Metode Penelitian yang digunakan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu dari berbagai referensi. Fokus penelitian menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers yang mengukur efektivitas mernggunakan indikator pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yaitu Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* yang diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi peneliti. Teknik analisis data menggunakan data interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Hubberman yaitu *Data Collecting, Data Condensation, Data Display, Conclutions and Verifying*. Keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yaitu perpanjangan pengamatan, triangulasi data dan menggunakan bahan referensi yang dimana dalam uji kredibilitas ini diharapkan mampu memberikan data-data yang akurat dan valid. |
| **KataKunci**  Kata Kunci 1  Kata Kunci 3  Kata Kunci 3  dst |  | ABSTRAK (10pt)  Model Penulisan Abstrak (10 pt).  Abstrak di tulis dengan ketentuan maksimal 250 Kata, dengan kata kunci 3 (tiga) hingga 5 (lima) kata. |
| Article history  Submited  Revised  Accepted  **Riwayat Artikel**  Mengirim  Penelaahan  Diterima |  | This is an open access article under the [CC–BY-NC-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  Akses artikel terbuka dengan model [CC–BY-NC-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) sebagai lisensinya.  H:\B. Proses Naskah ARISTO Old\Fix New Template Vol 08 No 01 Januari 2019\by-nc-sa.png |

# Introduction (Theory)

Pada masa periode globalisasi E-government sekarang, pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya dengan melayani masyarakat dengan efisien, cepat, sederhana, hemat biaya, transparan dan akuntabel. Akan tetapi pada faktanya, pemerintah seringkali merasakan kesulitan dalam memberikan layanan karena prosedur yang rumit dan pungutan-pungutan ilegal yang masih beredar hingga saat ini. Oleh sebab itu, sistem pengelolaan pemerintah yang baik melalui E-government adalah harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia. (Ombudsman RI, 2020) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik yaitu pemerintah yang membangun dan mengimplementasikan dasar-dasar profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, validitas dan supremasi hukum serta diterima oleh semua lapisan masyarakat. Akan tetapi menurut United Nations Development Programme (UNDP) berpendapat bahwa governance itu sendiri merupakan suatu bentuk pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi dan administratif dalam mengelola permasalahan yang dihadapi suatu negara dengan mengerahkan partisipasi semua sektor .(thoyib, 2019) Pemerintahan Indonesia mengupayakan dalam menciptakan good governance yaitu menerapkan cara perubahan disetiap aspek tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang biasa disebut dengan e-Government. Dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut akan membawa perubahan yang mendorong terciptanya good governance. Salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka dengan adanya akuntabilitas tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dan memperhatikan peraturan yang berlaku. (Widiyarta,2017). Maka dari itu pelayanan publik juga bisa dijadikan sebagai acuan pemerintah menganalisis seberapa jauh efektivitas telah berjalan di era e-government sekarang.

Pengimplementasian E-government di Indonesia berawal pada tanggal 24 April 2001 dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 mengenai pengembangan serta Pemanfaatan Telekomunikasi (Telekomunikasi, Media dan IT) di Indonesia. Best practice dari penerapan e-Government untuk menciptakan good govenance Indonesia yaitu dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik disebut juga e-procurement. Pemerintah Kota Surabaya ialah salah satu daerah yang menerapkan e-procurement di penyelenggaraan pemerintahan. (Nurhakim,2014) E-procurement sendiri ialah inovasi dari procurement secara konvensional. Berdasarkan Sutedi (2012), e-procurement ialah suatu mekanisme lelang pengadaan barang/jasa pemerintah yang memakai teknologi, informasi serta komunikasi berbasis internet sehingga pengadaan bisa dilaksanakan tepat waktu, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, Helmy Prasetyo Yuwinanto (2013) E-Procurement merupakan kelanjutan dari pengadaan publik yang bersifat tradisional, karena seperti yang diketahui banyak orang, pelaksanaan pengadaan publik sebelumnya telah menimbulkan banyak permasalahan, bahkan dapat menimbulkan kecenderungan arah korupsi. Sebagaimana disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan sebagian kasus korupsi di Indonesia, khususnya kasus pidana korupsi, ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tipikor (KPK) mayoritas (77%) kasusnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa menurut Hardjowiyono dalam Kurniawan (2007), artinya korupsi yang sering terjadi di Indonesia merupakan korupsi birokrasi.

**Tabel 1 Timeline penerapan e-procurement di Indonesia sejak 2002**

| **Tahun** | **Alur Penerapan** |
| --- | --- |
| 2002 | Percobaan 1 paket *E-Procurement* |
| 2003 | Percobaan 60 paket *E-Procurement* |
| 2004 | Menyebarkan *e-procurement* untuk pusat dan DKI Jakarta |
| 2005 | Menyebarkan *e-procurement* pada semua pulau Jawa |
| 2006 | Pulau Jawa dan 7 provinsi lainnya (Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bali) |
| 2007 | Pulau Jawa dan 15 provinsi lainnya (Sumbar, Sumut, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Bali, NAD, Gorontalo, Riau, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sulut , Kalsel NTB) |
| 2007 | Pusat melakukan penerapan uji coba semi *e-procurement* plus |
| 2008 | Pulau Jawa dan 26 provinsi lainnya (Sumsel, Sumut, Sumbar, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulut NTB, Kepri, Babel, NAD, Kalbar, Kalteng, Sultra, Sulteng, NTT, Kalsel, Maluku, Malut, Bali, Papua Barat, Papua) |
| 2008 | DKI Jakarta dan Pusat menerapkan tahap baru yaitu semi *e-procurement* plus |
| 2009 | Pusat dan Pulau Jawa menerapkan semi *e-procurement* plus |
| 2009 | Provinsi di luar Pulau Jawa mengimplementasikan semi *e-procurement* |
| 2010 | Pusat dan Pulau Jawa dengan 4 Provinsi lainnya (Kalsel, Gorontalo, Bali dan Riau) tahapan semi *e-procurement* plus. Di luar provinsi tersebut melaksanakan semi *e-procurement*. |
| 2011 | *Full* *e-procurement* diimplementasikan pada 24 provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, NTB, dan Bali. |
| 2011 | Semi *e-procurement* diimplementasikan pada 9 provinsi yaitu: Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, Bengkulu, Papua dan Papua Barat. |

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Adanya e-procurement juga merupakan suatu kebutuhan pemerintah dikarenakan banyak konflik yang terbentuk di saat pembelian barang/jasa konvesional. Seperti contohnya prosedurnya rumit dan menyita waktu yang cukup lama. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam procurement konvensional ini, diantaranya (1) identifikasi kebutuhan barang/jasa (2) penentuan vendor (3) pemilihan vendor berdasarkan pertimbangan tertentu (4) pembuatan daftar barang/jasa yang akan dibeli (5) pengawasan barang/jasa yang dipesan (6) pemberian faktur (7) pembayaran. Adanya tahapantahapan tersebut memunculkan kurangnya transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan, yang kemudian akan memberikan dampak negatif seperti kerugian bagi pemerintah ataupun perusahaan itu sendiri. (Liziad & Kenny, 2017)

Pemerintah Kota Surabaya dalam menyikapi e-government sendiri guna mendukung proses E-Procurement ini yaitu dengan memanfaatkan e-Government untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan kecepatan dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini juga sebagai upaya untuk menarik partisipasi Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. E-government ini juga mencakup pengelolaan keuangan, persuratan dan proses perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan dan medis Kota Surabaya. Salah satu contohnya yaitu E-procurement dengan website E-procurement atau LPSE masyarakat sebagai penyedia dan dinas sebagai penyalur dapat tersinkronisasi menjadikan semua proses akuntabel dan transparan (Astari, 2020). Penyelenggaraan pengadaan secara elektronik diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 mengenai perubahan keempat atas keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Barang dan Jasa Pemerintah serta diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai untuk pengadaan barang atau jasa publik. Sedangkan bagi Surabaya sendiri, Perihal ini diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2006 yang berisi petunjuk penerapan mekanisme seleksi pemerintah daerah terhadap pemasok barang/jasa dengan memakai sistem pengadaan elektronik. Bahwa dalam rangka membangun transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pembelian barang/jasa daerah yang dibiayai APBD daerah serta mengoptimalkan standarisasi proses dalam pemilihan barang/jasa oleh pemasok. Pemerintah Daerah yang menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, sehubungan dengan instruksi tersebut ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2006. melaksanakan mekanisme seleksi pemasok barang/jasa pemerintah daerah dengan memakai sistem e-procurement.

Selanjutnya guna memudahkan serta menyamakan pemahaman satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun kontrak/surat perjanjian terkait dengan proses pemilihan pemasok barang/jasa pemerintah, perlu melengkapi contoh kontrak. sampel sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Seleksi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

**Tabel 2 Implementasi E-procurement Kota Surabaya Mulai Tahun 2004 Sampai Tahun 2014**

| No | Tahun | Perkembangan *e-procurement* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | Permulaan *e-procurement* mulai diterapkan  pada Pemerintahan Kota Surabaya |
| 2 | 2007 | Tiga tahun setelah implementasi awal, masih terdapat tanda-tanda Maladministrasi seperti KKN pada 27 dari 34 proyek  Yang diusung *E-procurement* |
| 3 | 2010 | * Kota Surabaya menduduki ranking 3 besar dari 50 kota lainnya di Indonesia yang terjadi paling sedikit korupsinya. * Program penawaran elektronik Kota Surabaya telah diterapkan oleh LKPP untuk diimplementasikan secara nasional di seluruh daerah lain di Indonesia. |
| 4 | 2011 | Kota Surabaya mendapat nilai tinggi atas inisiatif-inisiatif penting pada beberapa bidang, khususnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia dengan nilai 7,58 (ranking 3), akses informasi berita publik dengan nilai 9,67 (ranking 1), transparansi pengadaan barang/jasa. mendapat nilai 9,86 (ranking 1) dan melaksanakan rekomendasi perbaikan dari BPK/APIP/BPKP |
| 5 | 2013 | Hingga November 2013, jumlah paket pekerjaan yang dilelang sebanyak 94 paket dengan hasil anggaran Rp1,4 triliun. Namun Pemkot Surabaya berhasil menurunkan efisiensi lelang hingga 22,93%. |
| 6 | 2014 | Sistem lelang sekarang saat ini memudahkan tata kelola pekerjaan, menjadikan rata-rata proyek konstruksi dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Misalnya, data dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) yang dimuat pada harian Jawa Pos pada 7 Februari 2014, melelang 142 bidang tanah kontruksi, padahal baru memasuki bulan kedua, yaitu bulan Februari. |

Sumber : Jurnal Novitaningrum (2014)

E-Procurement pertama kali dilaksanakan oleh Kota Surabaya pada tahun 2004. Sistem ini mempunyai banyak hal unggulan dengan semuanya menggunakan basis elektronik. Berbasis teknologi digital, Pemerintah Kota Surabaya ingin melaporkan kepada masyarakat dan menerapkan program ini. Semua kalangan juga dapat mengetahui secara menyeluruh kegiatan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Peran dari teknologi digital akan menjadi sangat penting dalam pelayanan publik di masa depan dengan mendorong percepatan layanan dan mengurangi anggaran dengan teknologi informasi (Astari, 2020). Pembelian secara elektronik sudah diterapkan Kota Surabaya sejak awal berdirinya tepatnya pada tahun 2004 telah mendapatkan banyak penghargaan atas keberhasilan pelaksanaannya. Berbagai penghargaan tersebut antara lain diraih oleh Lembaga Kemandirian Jawa Pos sebagai kota dengan tanggung jawab publik terbaik di tahun 2011 dan 2012 dengan program Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintah (SIMaSDaP), secara spesifik merupakan program yang memanfaatkan akses internet dan mengungkap apapun sesuatunya. hadiahnya. kegiatan pekerja pemerintah tunggal di Surabaya. Apresiasi lainnya adalah e-Proc Award yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2013 karena berhasil mengubah sistem lelang manual menjadi sistem lelang elektronik. Penghargaan ini serupa dengan Indonesia Future Government Award tahun 2013 yang diberikan oleh James Smith, CEO FutureGov yang berbasis di Singapura atas prestasinya dalam menciptakan program pemerintahan dan informasi yang transparan, dengan memakai jaringan informasi dan komunikasi.

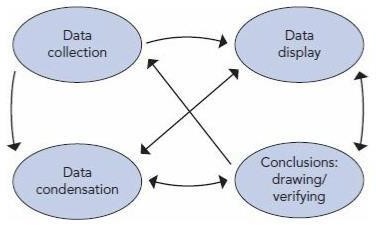
Namun kesuksesan pengadaan e-procurement dinilai gagal menciptakan interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian Muhammad Kholis pada tahun 2006 yang menyimpulkan bahwa keberadaan sistem pengadaan publik secara online tidak dapat dianggap sebagai pendukung TI yang menghubungkan upaya mewujudkan good governance dan tidak dapat membentuk hubungan interaktif yang baik antar pemerintah. dan sektor swasta, industri dan masyarakat.Juga dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa berdasarkan Jasin (2007), berbagai hambatan maupun kekurangan serta permasalahan teknis yang ditemui pada saat penerapan e-procurement antara lain: Banyak penyedia barang/jasa (supplier) yang belum memahami penerapan e-procurement, beberapa besar panitia pengadaan masih mengalami kesusahan menerapkan dalam mendalami e-procurement. Sangat tingginya taraf kesalahan pemakaian password dan username keamanan lainnya oleh pemakai, juga oleh penyedia barang/jasa, penanggung jawab pengerjaan operasional dan otorisasi panitia pengadaan, ruang lingkup agenda status lelang masih belum dapat seutuhnya diimplementasikan dengan benar oleh panitia pelelangan. Diketahui, ketersediaan sarana konektivitas internet dan sarana penunjang lainnya (semacam installer Adobe, scanner, dll) kepada panitia pengadaan Pemerintah Kota Surabaya masih sangat terbatas. Keterbatasan bandwidth memicu sering terjadinya kesalahan mekanisme pada penggunaan e-procurement menjadikan sebagian kelompok pada lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khawatir pemasukan tambahan mereka dari melakukan kegiatan pengelolaan pelelangan (melalui pengadaan, penerapan serta pemantauan) bakal terpotong habis.

# Method / Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena ingin mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat. Menurut Moleong dalam (Setyawan, 2019), pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. secara holistik dan menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang alami dan menggunakan berbagai metode ilmiah. Perumusan permasalahan penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian.

Penentuan fokus penelitian pada penelitian kualitatif ini dibutuhkan untuk membatasi studi yang akan dibahas dan berfungsi untuk memenuhi kriteria pembahasan. Penentuan fokus penelitian dibutuhkan guna membantu pelaksanaan penelitian dengan berpedoman pada poin atau indikator permasalahan yang hendak ditelusuri terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa melalui E-procurement kota Surabaya. fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif adalah memuat permasalahan pokok yang masih bersifat umum. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari informan di lapangan. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan e-procurement kota Surabaya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berupa dokumen-dokumen, laporan- laporan, arsip-arsip, dan lain-lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku pedoman, berita, website, dan lain-lain.

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik purposive dan snowball sampling dimana Informan awal diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan informasi dalam mencari kebenaran data. Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan. Informan lainnya adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan dan penyedia barang dan jasa atau tender yang mengikuti proses E-Procurement. Selanjutnya dari informan tersebut dilanjutkan dengan informan lainnya dengan metode Snowball sampling.

****

Sumber: Qualitative Data Analysis, Miles & Hubberman (2014)

Menurut Miles and Huberman (2014) dikutip dalam Abdussamad (2021:160) terdapat teknik analisis data yang dikembangan dengan model interaktif dengan empat tahapan. Pertama, Pengumpulan data (Data Collection Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiganya mempunyai satu kesamaan analisis sangat bergantung pada kemampuan integratif dan interpretatif peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang bersifat numerik, rinci, dan panjang. Kedua, Kondensasi data (Data Condensation) Kondensasi data merujuk pada mekanisme pemilihan, pemfokuskan, penyederhanaan, pengabstraksi, atau pengubah data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan secara tertulis, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan merangkum data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, menjadikan peneliti dapat menghubungkan suatu data dengan data lainnya untuk memperkuat setiap data yang diperoleh dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam menganalisis data. Ketiga, Penyajian Data (Data Display) merupakan suatu penyajian yang terorganisasi, sekumpulan sorotan yang memungkinkan penarikan kesimpulan dari sorotan yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang diambil bersifat dinamis. Keempat, Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusions Drawing and Verifying) merupakan hasil penelitian yang sesuai dengan arah penelitian berdasarkan hasil analisis data. Temuan yang disampaikan berdasarkan kajian penelitian sebagai subjek penelitian deskriptif.

# Literatur Review / Studi Kepustakaan (bold, 12 pt) (Especialy Studi Kepustakaan)

Pada penelitian Diah Astari, L., Dalatululum, M., Kurniasih, N., Indahsari, N. D., & Kurniasih, Y. (2020). Berjudul Analisis Penerapan E-procurement Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis juga menjelaskan mengenai bagaimana efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-procurement. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan pengadaan publik secara elektronik dalam pengadaan barang dan jasa di kota Surabaya diterapkan secara efektif. Hal ini tercermin dalam berbagai penghargaan yang diterima dan kemampuan untuk memenuhi kriteria kinerja, termasuk manusia, uang, material, mesin, metode, pemasaran, catatan dan informasi. Penerapan e-procurement merupakan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau kepada berbagai segmen masyarakat.

Pada penelitian Daroyani Novitaningrum, B. (2014). Penelitian ini berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Penelitian ini dilakukan dengan urgensi guna mengetahui akuntabilitas dan transparansi Pemerintah yang ditunjukkan kepada publik melalui aspek pengadaan, setelah menggunakan pengadaan elektronik sebagai sistem terbaru untuk reformasi pengadaan publik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini bersifat purposive sampling dikarenakan peneliti ingin menggali informasi secara mendalam dari orang-orang yang benar-benar memahami fokus penelitian. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi bisa tercapai. Persepsi akuntabilitas tersebut dapat ditunjukkan melalui upaya panitia dalam mewujudkan akuntabilitas segala mekanisme lelang, baik secara vertikal ataupun horizontal. Dan hasil penelitian yang transparan ini terlihat melalui informasi pembukaan lelang yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, untuk meminimalisir risiko penyimpangan.

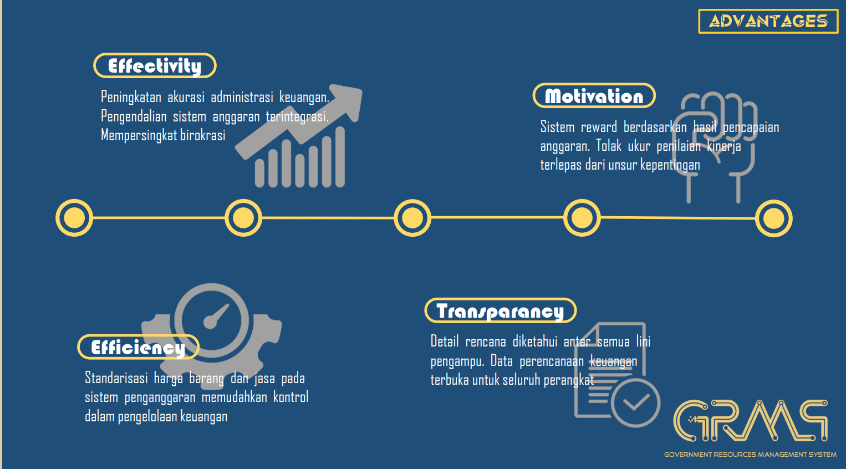
Pada penelitian Suprianto, A., Zauhar, S., & Santoso Haryono, B. (2019). Penelitian ini berjudul Analisis Efektivitas Sistem E-procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Efektivitas Sistem E-procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Penelitian ini menghasilkan dua hasil. Pertama, proses pembelian barang/jasa di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya telah sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa umum, mulai dari analisa prosedur dan fungsi terkait pengolahan informasi, informasi dan dokumen pada sistem pengadaan secara elektronik. . Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya mekanisme pengendalian komitmen pelaku usaha pemenang lelang. Kedua, sistem e-procurement pembelian barang/jasa pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sudah berjalan efektif, meskipun masih terkendala permasalahan komposisi pegawai pada kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pegawai di luar Fakultas Ilmu Administrasi.

# Results and Discussion / Hasil dan Pembahasan (bold, 12 pt)

Pada bagian ini merupakan uraian data dan temuan berdasarkan pengamatan yang ditemukan oleh peneliti pada saat penelitian. Pada penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data yang telah disusun sebelumnya melalui observasi, wawancara,dan dokumentasi. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pengadaan barang dan jasa melalui E-procurement Kota Surabaya, maka mengacu pada focus penelitian menurut teori efektivitas Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) yang memiliki 3 indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi

**Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan memusatkan perhatian pada aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam program dan prosesdur unuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan pada penelitian ini diartikan untuk mengetahui sejauh mana perubahan nyata tujuan dari adanya E-procurement tercapai secara menyeluruh untuk mengatasi permasalahan efektivitas pengadaan barang dan jasa yang ada di Kota Surabaya. E-procurement ditujukan untuk mengatasi kecurangan dan efektivitas pada penanganan pengadaan barang dan jasa yang ada di Kota Surabaya dengan harapan adanya E-procurement kecurangan dan maladministrasi yang ada di kota ini bisa Berkurang. Namun seperti yang terdapat pada penelitian terdahulu mengenai E-procurement kota Surabaya penyedia barang/jasa (supplier) yang belum memahami penerapan e-procurement, beberapa besar panitia pengadaan masih mengalami kesusahan menerapkan dalam mendalami e-procurement. Sangat tingginya taraf kesalahan pemakaian password dan username keamanan lainnya oleh pemakai, juga oleh penyedia barang/jasa, penanggung jawab pengerjaan operasional dan otorisasi panitia pengadaan, ruang lingkup agenda status lelang masih belum dapat seutuhnya diimplementasikan dengan benar oleh panitia pelelangan. Tujuan dari E-procurerment sendiri tercantum pada Government Resource Management System (GRMS) Kota Surabaya yang menjadi symbol bahwa tekat yang kuat dari pemerintah Surabaya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan misi ke 4 nya yaitu Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan public. sebagai berikut :

****

**Gambar 1 keuntungan E-procurement tertulis pada GRMS Kota Surabaya**

Menurut Bu mita selaku staff kepegawaian unit kerja pengadaan barang dan jasa menuturkan bahwa E-procurement sebagai aplikasi juga bisa terkena lag/maintenance oleh karena itu di unit kerja pengadaan barang dan jasa kita sebagai admin juga memiliki operator atau software engineer yang bertugas untuk memelihara juga menjaga agar aplikasi bisa berjalan efektif akan tetapi kita tidak bisa menduga kapan aplikasi akan down server sehingga ketika aplikasi down para penyedia dipersilahkan untuk ke unit pelayanan pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pemberkasan atau diskusi. Dan pendapat dari bu nova sigma selaku peserta tender/Konsultan pengadaan barang dan jasa dari PT Delta Buana menuturkan bahwa dampak E-procurement ini bisa dikatakan efektif dikarenakan banyak penyedia dari e-procnya dan kita dikualifikasikan sehingga ketika mengeluarkan tender dan mengupload tender semua menggunakan e-proc secara online dan cukup efektif sedangkan ketika pembuktian pengecekan berkas harus offline di kantor pengadaan barang dan jasa mungkin untuk masalah nya adalah proses atau evaluasi dari tender yang lama bisa mencapai 3 bulan sebelum pengumuman pemenang tender.

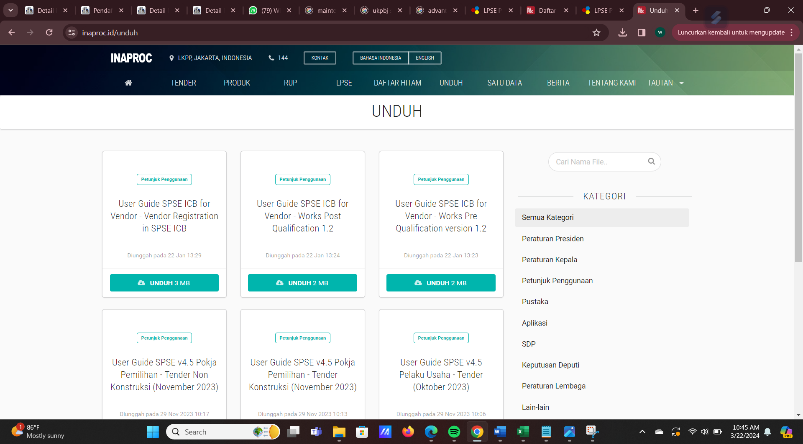
Tanggapan mengenai proses dan tahapan e-proc ini juga sampai kepada pihak pemkot sendiri mengenai efektivitas E-procurement. Seperti yang dikatakan bapak Naufal Rizky Wardhana, S.Ars selaku Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seperti berikut kecurangan ini sangat minim dikarenakan dari LPSE ini sangat transparan dan siapapun termasuk masyarakat bisa mengakses dan memantau proses berjalannya tender di web e-procurement tanpa login. Mungkin yang jadi penghambat sedikit dikarenakan adanya daftar hitam. Daftar hitam ini terjadi ketika mengupload dokumennya dan ketika dikoreksi terdapat ketidaksesuaian dokumen misalnya dari tenaga ahlinya cuma sertifikatnya aja tetapi orangnya gaada biasanya ada yang kayak gitu dan macam-macam ucap bapak Naufal. Penyedia yang masuk dalam blacklist tidak bisa mengikuti tender akan tetapi harus menunggu 1 tahun untuk mengikuti pelelangan lagi dan yang jadi penghambat ketika penyedia belom dimasukkan list blacklist berarti penyedia ini bisa berkeliaran dan dapat menghambat proses e-procurement.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa E-procurement untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa dikota Surabaya dinilai tepat dikarenakan dengan adanya E-procurement ini mampu menekan proses yang lama dalam pelelangan sehingga meminimalisir kontak langsung dan maladministrasi. Namun, dalam pengoperasiannya yang sudah sepuluh tahun terdapat hambatan yang ditemui dan selayaknya aplikasi masih terdapat trouble system/ bandwitch juga adanya daftar hitam yang membuat proses dari E-procurement masih terhambat.

**Integrasi**

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, dan komunikasi dengan organisasi lainnya. Fokus Integrasi ini bersangkutan dengan proses sosialiasi program. Pada Fokus Integrasi ini untuk mengetahui apakah sosialisasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengenalkan E-procurement sesuai dan tepat sasaran. Keberhasilan integrasi dapat diamati dari tercapainya partisipasi sasaran dalam tahapan sosialisasi mengenai E-procurement. E-procurement sebagai alat pengadaan barang dan jasa tidak serta merta diketahui oleh seluruh kalangan masyarakat Surabaya, Menanya bagian pengadaan barang dan jasa bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan Sosialisasi untuk memperkenalkan E-procurement ke khalayak luas pada semua kalangan masyarakat. Selama sepuluh tahun E-procurement beroperasi, Pihak Pemerintah telah melakukan berbagai Sosialisasi untuk menarik masyarakat menggunakan E-procurement.

Bu Mita selaku staff kepegawaian unit kerja pengadaan barang dan jasa menuturkan bahwa untuk sosialisasi sendiri kita terdepan ada di website kami yaitu LPSE disitu bisa dicari informasi paket yang tersedia tanpa harus login ke dalam akun LPSE dan juga kita memiliki Instagram untuk media sosialisasi kita. Bu mita juga menuturkan bahwasahnya sosialisasi juga diadakan offline untuk para penyedia. Untuk sosialisasi sendiri terjadi ketika ada fitur-fitur terbaru kalau katalog ada penyedia kita memiliki grup tersendiri jadi kalo semisal ada perubahan kita biasanya umumin di grup. Tapi kalo bimtek atau LKPP sering sekali melakukan sosialisasi paling tidak satu bulan sampai 2 atau 3 kali untuk pelaku usaha untuk penggunaan LPSE ataupun E-katalog dengan cara online melalui zoom. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada penyedia yang bingung kita disini ada layanan pengadaan jadi membantu perangkat daerah atau penyedia kalau bingung mengenai e-procurement bisa datang disini di Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa atau di Siola juga ada.



**Gambar 2 Contoh User Guide Tentang Penggunaan E-procurement**

Sedangkan pendapat dari bapak Naufal Rizky Wardhana, S.Ars selaku Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri yaitu kalau sosialisasi sudah dilakukan jadi kita itu sosialisasinya dibilang rutin juga ngga dikarenakan perubahan dari LPSE yang bersifat minor kayak misalnya perubahan LPSE versi 2.4.1 ke LPSE versi 2.4.2 jadi setiap perubahan kayak gitu kita tidak perlu melakukan sosialisasi dikarenakan perubahan yang minor dan jarang dipakai juga fitur fiturnya biasanya fitur minor cuma optimasi. tapi ketika perubahan mayor seperti 2.5.2 itu akan dilakukan sosialisasi karena biasanya tombol-tombol didalamnya juga ikut berubah. Seperti halnya yang dikatakan bapak Naufal mengenai sosialisasi e-procurement ada pula tanggapan yang diberikan oleh bu nova selaku peserta dari e-procurement sendiri terkait dengan sosialisasi e-procurement beliau mengatakan bahwa kadang ada peraturan terbaru terkait e-procurement itu disosialisasikan tapi saya terakhir ikut sosialisasi pada tahun 2022,itu kan kalau LPSE nyangkut di E-delivery Surabaya itu kan ada sosialisasi nya juga jadi semua terhubung.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Integrasi pemerintah kota melalui Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan dan Unit kerja Pengadaan Barang dan jasa yang melakukan sosialisasi mengenai E-procurement di media social maupun website seperti pada Instagram dan Website E-procurement dinilai cukup tepat karena melakukan sosialisasi secara daring di media sosial siapa saja bisa mengetahui Informasi tersebut. Sosialisasi yang ada pada laman Instagram @bpbjap berisikan informasi yang sangat penting seperti cara penggunaan aplikasi, jadwal pengaduan layanan pengadaan barang dan jasa, informasi tender/katalog Surabaya, konsultasi pembuatan akun LPSE, juga pemberitahuan dan monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa dan masih banyak lagi. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada masyarakat surabaya terlebih lagi untuk calon tender agar memudahkan mereka ketika ingin ikut bertasipasi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.

Namun meskipun dinilai cukup tepat masih terdapat kendala dalam pengimplementasi sosialisasi tersebut bahwasanya kurang rutinnya pihak pelaku pengadaan barang dan jasa dalam menyuarakan sosialisasi mengenai pengadaan barang dan jasa terlebih lagi tidak semua masyarakat memiliki akun media sosial yang berakibat tidak semua orang menerima informasi E-procurement dibuktikan dengan minimnya interaksi di social media antara pemerintah dan masyarakat atau tender. Sehingga dari permasalahan tersebut, pihak pengelola E-procurement perlu meningkatkan lagi sosialisasi mengenai pengadaan barang dan jasa agar semua elemen masyarakat mampu menerima informasi dengan harapan semakin gencar sosialisasi yang diberikan semakin tinggi daya tarik masyarakat menggunakan aplikasi E-procurement. Dengan minimnya informasi dan sedikitnya sosialisasi langsung kepada para tender dan akan berdampak terhadap efektivitas e-procurement karena apabila semakin dikit orang tau mengenai informasi E-procurement maka sedikit pula minat masyarakat terhadap E-procurement Kota Surabaya dan apabila peminat semakin sedikit maka bisa dipastikan kepercayaan masyarakat terkait e-government untuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan semakin hilang.

**Adaptasi**

Adaptasi diketahui dari kemampuan kebijakan beradaptasi dengan kondisi masyarakat serta kemampuan kebijakan memberikan rangsangan perubahan kepada masyakarat. Selain itu, kemampuan adaptasi dapat diketahui dengan kebutuhan yang berkembang di Masyarakat. Dari proses adaptasi ini dilihat apakah adanya E-procurement masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan beralih dari procurement secara konvesional menjadi menggunakan E-procurement untuk mengatasi Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dan menjadikan pelayanan semakin efektif di Kota Surabaya.

Seperti yang kita ketahui E-procurement sebagai perwujudan E-government di kota Surabaya tentunya harus dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang mumpuni dan modern yang membuat nyaman dan memberikan rasa aman bagi para kalangan masyarakat. Fasilitas yang diberikan E-procurement merupakan fasilitas pendukung aplikasi seperti konektivitas internet dan sarana penunjang lainnya (semacam installer Adobe, scanner, dll). Juga fasilitas pelayanan di kantor seperti klinik pelayanan pengadaan barang dan jasa.



**Gambar 3 Fasilitas Komputer E-Procurement Pada Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kota Surabaya**

Bu nova selaku Konsultan tender PT. Delta Buana dan pengikut E-procurement Kota Surabaya menuturkan mengenai sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya sebagai berikut Untuk sarana dan prasarana sendiri ya mas sudah cukup bagus si mas dikarenakan dulu kan offline sekarang jadi online dan lebih cepat meskipun kadang terjadi lag atau maintenance selayaknya aplikasi dan dengan adanya klinik pengadaan barang dan jasa juga cukup terbantu. Pernyataan tersebut juga didukung oleh bapak Naufal Rizky Wardhana, S.Ars selaku Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mengenai sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya terhadap berlangsungnya pengadaan barang dan jasa sebagai berikut Fasilitas atau sarana dan prasarana yang diberikan dari kami yaitu bantuan konsultasi si mas baik berupa helpdesk di website E-procurement itu langsung terhubung ke whatsapp kantor kami dan kami memberikan layanan mengenai E-procurement. Juga bagi tender yang sekiranya masih bingung terkait pengadaan barang dan jasa kita juga menerima para tender untuk langsung menemui kita kekantor dan kita kasih arahan mengenai proses pengadaan barang dan jasa.

Pendapat yang diutarakan bu nova selaku pemakai aplikasi E-procurement dan Bapak Naufal selaku pelaku dalam aplikasi E-procurement ini bahwasahnya sarana dan prasarana yang ada pada E-procurement mampu membuat masyarakat yang dulu melakukan pengadaan barang dan jasa secara konvesional tertarik melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dari semua wawancara diatas menyebutkan bahwa sarana dan prasarana yang ada pada E-procurement sangatlah bagus dan nyaman untuk yang offline, Akan tetapi menurut narasumber menyatakan bahwa meskipun E-procurement dibekali dengan persiapan yang canggih dan modern selayaknya aplikasi online lainnya E-procurement juga biasanya mengalami kendala pada aplikasinya contohnya seperti maintenance dan lag jika diteruskan ini akan menyebabkan proses dari penerapan pengadaan barang dan jasa menjadi kurang efektif.

**Tabel 3 Jumlah Paket Tender 4 Tahun Terakhir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun Pengadaan Paket | Jumlah Seluruh Paket |
| 1 | 2021 | 260 Paket |
| 2 | 2022 | 390 Paket |
| 3 | 2023 | 218 Paket |
| 4 | 2024 | 29 Paket |

Sumber : Data diolah Penulis dari data Export paket tender 2021-2024 Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan

Dari data diatas yang diberikan oleh bapak Naufal dalam 4 tahun terakhir menunjukan tidak menentunya jumlah paket yang tersedia bisa dipengaruhi kebutuhan maupun minat dari para tender atau penyedia untuk mengikuti E-procurement kota Surabaya. Bapak Naufal juga mengatakan kita bisa mengetahui minat atau animo masyarakat terhadap E-procurement ini dari jumlah paket dikarenakan disetiap paket pasti terdapat beberapa penyedia yang ikut lelang dan jika semakin banyak yang ikut maka semakin tingginya animo masyarakat terhadap E-procurement. Pernyataan tersebut juga selaras dengan pendapat dari Bu Mita terkait animo masyarakat terhadap E-procurement Kota Surabaya yaitu bahwa animo masyarakat terhadap E-procurement ini ditandai dari banyaknya penyedia yang ikut dalam lelang tender mas. Seperti halnya pada 1 paket banyak penyedia yang memantau atau yang ikut bidding. Biasanya yang memantau banyak akan tetapi yang mengikuti bidding hanya sedikit dikarenakan menyesuaikan paket dengan spesialis dari para tender

Animo masyarakat juga terlihat pada pengunjung website E-procurement per tanggal 25 maret 2024 sebanyak 2,7 juta akun yang mengunjungi website E-procurement Kota Surabaya. Bu mita juga menjelaskan bahwasahnya disetiap pelelangan tender biasanya terdapat 50-70 penyedia yang memantau dan yang mengikuti bidding hanya berkisar 12-15 penyedia. Animo masyarakat juga terlihat pada kantor unit kerja pengadaan barang dan jasa dikarenakan meskipun E-procurement merupakan aplikasi online tidak menutup kemungkinan dilaksanakan penyesuaian berkas, diskusi, maupun pengaduan secara offline pada kantor pengadaan baranng dan jasa yang bertempat di Jl. Jimerto 25 - 27 Lantai 4, Surabaya dan Jl. Sedap Malam No. 1 Surabaya.

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa adaptasi masyarakat terhadap E-procurement ini cukup baik dikarenakan terdapat 2,7 juta pengunjung website E-Procurement yang hampir mendekati jumlah populasi penduduk kota Surabaya sebesar 3 juta penduduk. Akan tetapi masih terdapat hal-hal yang dapat mengurangi animo masyarakat terkait E-procurement hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang lebih memilih pengadaan barang dan jasa secara langsung atau E-catalog daripada E-procurement dikarenakan lebih simple dan lebih cepat tanpa menunggu waktu hingga berbulan-bulan. Hal itu juga dilatar belakangi oleh tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dalam birokrasi sehingga mereka lebih memilih mana yang lebih cepat untuk digunakan sebagai alat pengadaan barang dan jasa.

# Conclusion / Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Efektivitas E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa Kota Surabaya yang diteliti menggunakan teori efektivitas dari Richard M Steers yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut : (1) Dalam indikator pencapaian tujuan peneliti menyimpulkan bahwa pencapaian program dalam E-procurement sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum optimal dikarenakan masih adanya masih ada kendala yaitu dalam pengoperasiannya yang sudah sepuluh tahun terdapat hambatan yang ditemui dan selayaknya aplikasi masih terdapat trouble system/ bandwitch juga adanya daftar hitam yang membuat proses dari E-procurement masih terhambat. Dengan berbagai masalah tersebut bisa mempengaruhi jalannya proses dari E-procurement itu sendiri sehingga menyebabkan kurangnya efektif nya proses dari E-procurement Kota Surabaya. (2) Dalam indikator Integrasi Peneliti menyimpulkan bahwa proses sosiasliasi dalam penyelenggaraan E-procurement ini belum berjalan baik dikarenakan dalam implementasinya bahwasanya kurang rutinnya pihak pelaku pengadaan barang dan jasa dalam menyuarakan sosialisasi mengenai pengadaan barang dan jasa terlebih lagi tidak semua masyarakat memiliki akun media sosial yang berakibat tidak semua orang menerima informasi E-procurement dibuktikan dengan minimnya interaksi di social media antara pemerintah dan masyarakat atau tender. (3) Dalam indikator adaptasi Peneliti menyimpulkan bahwa proses adaptasi E-procurement berjalan cukup baik karena fasilitas yang modern dan terdapat 2,7 juta pengunjung website E-Procurement yang hampir mendekati jumlah populasi penduduk kota Surabaya sebesar 3 juta penduduk. Akan tetapi masih terdapat hal-hal yang dapat mengurangi animo masyarakat terkait E-procurement hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang lebih memilih pengadaan barang dan jasa secara langsung atau E-catalog daripada E-procurement dikarenakan lebih simple dan lebih cepat tanpa menunggu waktu hingga berbulan-bulan. Hal itu juga dilatar belakangi oleh tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dalam birokrasi sehingga mereka lebih memilih mana yang lebih cepat untuk digunakan sebagai alat pengadaan barang dan jasa.

# Acknowledgement / Ucapan Trimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penelitian dan penerbitan artikel ini. Pertama, terimakasih kepada Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan kota Surabaya,Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa dan Para Tender yang telah membantu dan memberikan informasi yang berguna untuk penelitian dan penulisan artikel. Terimakasih juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel jurnal ini. Penulis sangat bersyukur dan berharap bahwa jurnal ini nantinya dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi dan inspirasi untuk membuat kebijakan pelayanan publik yang berfokus pada kepentingan masyarakat.

**References / Daftar Pustaka**

*Government Research Management System* (GRMS) 2022 Kota Surabaya

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) di Indonesia.

Peraturan walikota surabaya nomor 73 tahun 2006 yang berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem *E-procurement*.

Diah Astari, L., Dalatululum, M., Kurniasih, N., Indahsari, N. D., & Kurniasih, Y. (2020). Analisis Penerapan *E-procurement* Sebagai Efisiensi Pemerintahan Kota Surabaya. In *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)* (Vol. 4, Issue 1).

Daroyani Novitaningrum, B. (2014). *Kebijakan dan Manajemen Publik Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)*. <http://www.index.ti.or.id/report/2010/11/09/>]

Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. In *Jurnal Penelitian Administrasi Publik │* (Vol. 7, Issue 2). <https://ombudsman.go.id>,

Aditya Soetanto, L., & Kenny Jonathan Setiobudi, dan. (2015). *Analisa Kendala Pelaksanaan E-Procurement Di Kota Surabaya*.

*Agus Widiyarta. (2017). Dinamika Governance*. (Vol. 7 No. 1).

Handayani, N., Jurnal, J., Akuntansi, I., & Keuangan, D. (2022). *Pengukuran Kinerja Manajemen Dalam Implementasi E-Procurement Untuk Mewujudkan Good Government Governance Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.

Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (n.d.). Efektivitas Program Sipraja Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. In *Jurnal Penelitian Administrasi Publik │* (Vol. 7, Issue 2). https://ombudsman.go.id,

Arifin, M., Widiyarta, A., & Studi Administrasi Publik Fisip Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, P. (2021). *Efektifitas Absensi Online Dalam Disiplin Kerja Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Surabaya Saat Pandemi Covid-19 Muhammad Arifin, Agus Widiyarta*. *9*, 35–57.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Clara, I., Lengkoan, J., Liando, D., & Kumayas, N. (n.d.). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Jurnal Governance*, *2*(1), 2022.

Dr. Iwan Satibi, MSi. 2012. buku Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik

Eliana Sari. Seri Manajemen Organisasi : Buku 1. (2007) “Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi”. Jayabaya University Press

Irawan Muhammad Nizar Hidayat, B. (2021). *E-government : konsep, esensi dan studi kasus*.

Richardus Eko Indrajit. (2016). “Konsep dan Strategi Electonic Government”

Hidayat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, R. (2015). Penerapan *E-procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). In *Jurnal Ketahanan Nasional* (Vol. 21, Issue 2). <http://www.korankaltim.com/pemkab-ppu->

Satria, A., Nugraha, P., Zakaria, S., & Lesmana, A. C. (2021). Implementasi *E-procurement* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, *1*(2).

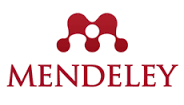
Ahmad, D. di, Kadir Adys, A., & Haq, N. (2020).Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Makassar *Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang*. *2*(2).

Antara News. 2018. “LKPP: pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik masih rendah.” Retrieved Juli 31, 2021 (<https://www.antaranews.com/berita/932384/lkpp-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-secara-elektronik-masih-rendah>)

Andriana, G. (2021). Vol 3, No 2. Jurnal Suara Hukum. *Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender*.

Ebook Metpen Zuchri Abdussamad (2021)

Penulisan referensi harus sesuai dengan APA (American Psychological Association) format. Referensi harus menggunakan sumber - sumber primer (jurnal atau buku). Dapat menggunakan aplikasi mendeley. (10 pt)



**Template Book Review**

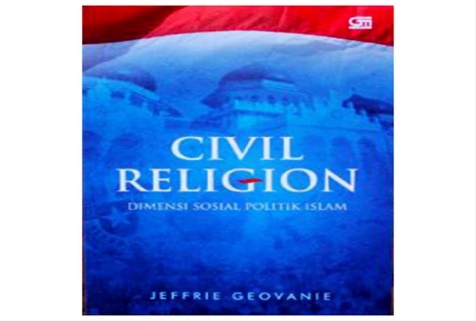
**Mengakar Kembali Perdebatan Konsep *Civil Religion* Robert N. Bellah & Jean Jacques Rousseau**

Author

Afiliasi

Alamat Lengkap Afiliasi

Email:

**Contoh Profile Buku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Judul Buku | : | *Civil Religion* (Dimensi Sosial Politik Islam) |
| Penulis | : | Jeffrie Geovanie |
| Penerbit | : | PT Gramedia Pustaka Utama |
| Tahun Terbit | : | 2013 |
| Jumlah Halaman | : | 328 |
| ISBN | : | 978-979-22-9639-6 |

**Sistematika Review Buku**

**Pendahuluan**

Berisi pentingnya kajian yang ada di dalam Buku.

**Poin Review**

Hal – hal subtantif yang menjadi sub bahasan dalam proses review, bersumber dari buku – buku dan karya ilmiah yang ada.

**Daftar Pustaka**

Rujukan yang dijadikan sebagai bahan analisis, pembanding dalam proses review Buku.

**Pedoman Penulisan Review**

1. Menuliskan judul review
2. Menulis Identitas, Mulai Nama Lengkap, Afiliasi, surel.
3. Mencantumkan identitas buku secara lengkap ditambah cover buku yang dimaksud.
4. Mengikuti sistematika penulisan Review Buku.